



Available online at **HISTORIA**; Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah
Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/historia>



RESEARCH ARTICLE

Strategi Defensif Pemikiran Pendidikan Islam Hamka Terhadap Ekspansi Ideologi Kiri (1959-1960)

Abdul Rouf¹, Aman¹, Dimas Aldi Pangestu², Gunung Gunawan³

¹Prodi. Pendidikan Sejarah, FIS, Universitas Negeri Yogyakarta

²Prodi. Pendidikan Sejarah, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia

³Arabic, Islamic, Middle Eastern and North African Studies (AIMNAS), University of Leeds, United Kingdom

Correspondence Author: dimasaldipangestu@upi.edu

To cite this article: Rouf, A., Aman., Pangestu, D.A., & Gunawan, G. (2026). Strategi defensif pemikiran pendidikan Islam Hamka terhadap ekspansi ideologi kiri (1959-1960). *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 9(1), 141-152. <https://doi.org/10.17509/historia.v9i1.98257>.

Naskah diterima : 18 Maret 2026, **Naskah direvisi :** 7 April 2026, **Naskah disetujui :** 30 April 2026

Abstract

Popular print media played an important role in religious education amid Indonesia's ideological contestation during the Guided Democracy period. This study examines Hamka's use of *Pandji Masjarakat* as an educational response to the growing influence of communism in 1959–1960. Using the historical method—heuristics, source criticism, interpretation, and historiography—the study primarily analyzes articles published in *Pandji Masjarakat*. The findings show that rather than relying solely on direct political polemics, Hamka developed a preventive educational strategy by strengthening Islamic faith, morality, and identity. Through religious, historical, literary, and social writings, the magazine constructed a counter-narrative to the materialism and atheism associated with communism. *Pandji Masjarakat* therefore functioned not only as a medium of da'wah but also as a platform for public education and religious identity formation. This study argues that Hamka's approach represented a pedagogical-cultural strategy for strengthening Muslim ideological resilience during the early Guided Democracy period.

Keywords: Communism; Guided Democracy; Hamka; Islamic Education; *Pandji Masjarakat*.

Abstrak

Media cetak populer memiliki peran penting dalam penyebaran gagasan dan pendidikan keagamaan di tengah dinamika politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Salah satu media yang menonjol adalah *Pandji Masjarakat*, majalah yang diasuh oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) dan menjadi ruang artikulasi pemikiran Islam di tengah menguatnya pengaruh politik dan ideologi kiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pendidikan Islam yang dikembangkan Hamka melalui *Pandji Masjarakat* dalam merespons ekspansi komunisme pada awal Demokrasi Terpimpin. Penelitian menggunakan metode sejarah yang mencakup heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dengan *Pandji Masjarakat* sebagai sumber primer utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hamka tidak semata-mata merespons komunisme melalui polemik politik langsung, tetapi membangun strategi pendidikan yang bersifat preventif melalui penguatan nilai ketauhidan, moralitas, dan identitas keislaman pembaca. Strategi tersebut diwujudkan melalui rubrik keagamaan, sejarah, sastra, dan pembahasan sosial yang membentuk kontra-narasi terhadap materialisme dan ateisme yang diasosiasikan dengan komunisme. Dengan demikian, *Pandji Masjarakat* tidak hanya berfungsi sebagai media dakwah, tetapi juga sebagai ruang pendidikan publik dan pembentukan identitas keagamaan. Temuan ini menunjukkan bahwa respons Hamka terhadap komunisme dapat dipahami sebagai strategi pedagogis-kultural yang menempatkan pendidikan keagamaan sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan ideologis umat Islam dalam kontestasi politik dan ideologi pada awal Demokrasi Terpimpin.

Keywords: Demokrasi Terpimpin; Hamka; Komunisme; *Pandji Masjarakat*; Pendidikan Islam.

PENDAHULUAN

Kemerdekaan Indonesia membuka babak baru bagi sejarah perjalanan bangsa. Dalam usaha mengisi kemerdekaan, umat Islam menunjukkan peran strategis yang diaktualisasikan melalui berbagai lini, salah satunya melalui dunia pers dengan menerbitkan majalah-majalah bermutu tinggi pada zamannya (Noer, 1988). Pers bercorak Islam di Indonesia sendiri memiliki akar historis yang panjang, berhulu dari terbitnya majalah *Al-Imam* (1906-1908) di Malaya hingga mengilhami lahirnya *Al-Munir* (1911-1916) di Minangkabau (Azra, 2002, hlm. 184-202). Seiring berjalannya waktu, pers bertransformasi mengikuti dinamika zaman. Pada dekade 1960-an, media cetak di Indonesia tidak lagi sekadar menjadi corong informasi, melainkan menjelma sebagai kepanjangan tangan dari polarisasi ideologi politik yang tajam di bawah kontrol ketat otoritas negara (Said, 1988).

Transisi politik krusial terjadi ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, yang menandai berakhirnya era Demokrasi Liberal dan dimulainya era Demokrasi Terpimpin. Dokumen otentik mengenai dekret ini dimuat secara eksplisit dalam Majalah *Pandji Masjarakat* (No. 3, 1959: 19) sebagai berikut:

“Menetapkan pembubaran Konstituante; Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara...”

Penerapan Demokrasi Terpimpin ini membawa konsekuensi besar terhadap konfigurasi politik nasional melalui pengenalan doktrin Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) serta Manifesto Politik (Manipol-USDEK) sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (Marbun, 1996: 394-395). Kebijakan akomodatif ini memberikan ruang bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk memperluas pengaruhnya secara masif di berbagai sektor, termasuk kebudayaan dan media massa (Ridho, 2013). Fenomena ekspansi ideologi kiri yang dinilai bernuansa materialis dan ateis memicu kekhawatiran dari kalangan intelektual muslim, yang melihat adanya ancaman laten terhadap fondasi moral dan akidah umat. Kekhawatiran ini salah satunya terdokumentasi dalam majalah Islam *Pandji Masjarakat*, Edisi 15 Juni 1959 pada tulisan “Sebab Majalah Diterbitkan” paragraf enam.

Salah satu tokoh muslim modernis yang merespons polarisasi ini melalui jalur kultural dan edukasi adalah Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka).

Sebagai seorang ulama dan sastrawan yang memiliki jaringan intelektual luas dengan Timur Tengah, Hamka menggunakan pers sebagai instrumen perjuangan gagasan (Salim, 2011). Melalui majalah *Pandji Masjarakat* yang didirikannya pada Juni 1959, Hamka menyuarakan narasi pendidikan Islam. Pendidikan Islam dalam konteks ini mewujudkan menjadi upaya penyadaran massal (edukasi publik) demi kemaslahatan umat. Inti pendidikan Islam yang disuarakan Hamka berakar kuat pada nilai-nilai ketauhidan. Bagi Hamka, urgensi Akidah (Tauhid) sebagai pondasi utama pendidikan. Melalui artikel pembukanya yang berjudul “Istiqomah”, Hamka menanamkan aspek esensial dalam pendidikan Islam, menumbuhkan keyakinan mutlak kepada Allah SWT sebagai landasan dalam segala lini kehidupan, termasuk dalam kebudayaan dan mencari ilmu pengetahuan.

Muatan ketauhidan ini secara masif disisipkan melalui berbagai karya sastra (puisi, cerpen, artikel) untuk membentuk benteng spiritual pembacanya agar tidak terpengaruh paham luar. Hamka menentang keras pemisahan agama dari kebudayaan (sekularisme). Melalui pilar pendidikan Islam, ia juga mengedukasi masyarakat bahwa puncak keindahan seni yang hakiki haruslah bersandar pada etika (Budi) dan kebenaran mutlak (*Al-Haqq*). Seni harus membawa jiwa manusia mendekat kepada Sang Pencipta, bertolak belakang dengan kelompok komunis yang menjadikan seni murni sebagai instrumen propaganda politik praktis semata.

Melalui majalah *Pandji Masjarakat*, Hamka berhasil mengontekstualisasikan pendidikan Islam di luar ruang kelas formal menjadi gerakan edukasi kebudayaan publik yang berbasis tauhid. Konsep pendidikan Islam Hamka berfokus pada integrasi yang seimbang antara ketajaman rasio (akal) dan kemurnian spiritualitas (akidah) untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Dalam hal ini *Pandji Masjarakat* bukan sekadar media informasi, melainkan sebuah institusi pendidikan Islam non-formal berbentuk pers (Nurdin, 2022: 201). Hamka memanfaatkan majalah ini sebagai wadah perjuangan modern guna mendidik moral umat serta membentengi masyarakat dari ancaman materialisme, ateisme, dan komunisme.

Kajian mengenai Hamka, pers Islam, dan pergolakan ideologi pada masa Demokrasi Terpimpin sebenarnya telah menarik perhatian luas dari para sejarawan dan akademisi, namun dengan kecenderungan fokus yang berbeda. Penelitian monumental dari Alfian (1989), misalnya, memberikan fondasi kuat mengenai perilaku politik intelektual muslim modernis, terutama Muhammadiyah, dalam merespons tekanan politik luar dan kontestasi domestik. Alfian melihat gerakan ini dalam kacamata institusional dan sosiologi politik.

Sementara itu, Deliar Noer (1988) menganalisis peran Islam politik dalam posisi dilematis sebagai kelompok mayoritas secara kuantitas tetapi terpinggirkan secara struktural di bawah kepemimpinan Soekarno. Noer menitikberatkan studinya pada konfrontasi kepartaian di tingkat parlemen dan ketegangan ideologis makro antara Islam dan komunisme.

Kajian mengenai pers Islam Indonesia menunjukkan bahwa media cetak tidak semata-mata berfungsi sebagai saluran penyampaian informasi keagamaan, tetapi juga sebagai arena produksi, sirkulasi, dan pembentukan identitas serta ideologi Muslim. Muzakki (2007) menunjukkan bahwa perkembangan penerbitan Islam pascakemerdekaan berkaitan erat dengan proses penyebaran dan penguatan orientasi ideologis tertentu di tengah masyarakat Muslim. Dalam perspektif yang lebih luas, media cetak Islam juga dapat dipahami sebagai bagian dari ruang publik tempat gagasan keagamaan dinegosiasikan dengan perubahan politik dan sosial (Muzakki, 2011). Temuan terbaru Zara (2026) mengenai budaya cetak Muhammadiyah bahkan memperlihatkan bahwa aktivitas penerbitan telah lama digunakan kelompok Muslim modernis Indonesia sebagai sarana pembentukan Muslim yang terdidik, saleh, dan mampu merespons modernitas. Pers Islam perlu dibaca bukan sekadar sebagai representasi pemikiran keagamaan, tetapi sebagai infrastruktur pendidikan publik dan pembentukan subjek Muslim modern.

Dalam konteks Demokrasi Terpimpin, fungsi tersebut memperoleh dimensi politik yang lebih kuat. Kajian mengenai *Pandji Masjarakat* umumnya menempatkan majalah ini dalam sejarah pers Islam, oposisi terhadap Demokrasi Terpimpin, atau kontestasi politik Islam dan komunisme. Studi tentang *Pandji Masjarakat* dan Gema Islam, misalnya, menunjukkan bahwa media Islam beroperasi dalam ruang publik yang semakin dibatasi negara dan berhadapan dengan represi terhadap pers kritis. Penelitian lain juga menunjukkan adanya keragaman strategi organisasi Islam dalam menghadapi Nasakom, dari akomodasi hingga nonkooperasi (Akmal, 2021; Mustapa & Hamid, 2024). Literatur tersebut penting untuk menjelaskan lingkungan politik tempat Hamka beroperasi, tetapi masih cenderung membaca media Islam terutama melalui kategori oposisi politik, kebebasan pers, dan konflik ideologis.

Dari perspektif orientalis dan sejarawan asing, James Rush dalam beberapa kajian biografinya melihat Hamka sebagai cerminan intelektual publik yang menjembatani identitas keislaman dengan kesadaran modernitas Indonesia. Di sisi lain, Howard Federspiel (2006) secara khusus memetakan dinamika intelektual

muslim abad ke-20 dengan menyoroti bagaimana pers Islam digunakan sebagai senjata menghadapi gelombang kebudayaan luar dan persaingan ketat narasi nasionalis, Islam, serta komunis. Pendekatan Federspiel lebih mengarah pada klasifikasi tipologi pemikiran teologis dan politik para cendekiawan Muslim.

Pada tataran teologis, M. Yunan Yusuf (1990) telah melakukan studi mendalam mengenai corak pemikiran kalam Hamka, terutama yang terefleksi dalam Tafsir Al-Azhar. Yusuf melihat Hamka berhasil melakukan rekonstruksi teologi Islam modernis (Tauhid) yang adaptif terhadap sains dan kemajuan zaman. Terakhir, dalam dimensi yang lebih populer dan humanis, Haidar Musyafa (2016, 2018) menyusun rekonstruksi kehidupan pribadi Hamka melalui pendekatan novel biografi. Musyafa secara naratif menggambarkan ketangguhan psikologis Hamka dalam menghadapi badai fitnah dari kelompok kiri (seperti rubrik Lentera di harian Bintang Timur milik Pramodya Ananta Toer) serta periode penahanannya oleh rezim Soekarno.

Meskipun literatur-literatur di atas telah mengupas Hamka dari berbagai sudut pandang, mulai dari politik praktis (Alfian dan Deliar Noer), biografi kultural (James Rush), peta intelektual (Federspiel), teologi murni (Yunan Yusuf), hingga narasi psikologis-biografis (Haidar Musyafa), belum banyak kajian yang mengaitkan secara spesifik bagaimana produk jurnalistik berupa rubrikasi majalah *Pandji Masjarakat* difungsikan secara sengaja sebagai instrumen strategi defensif spiritual.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, artikel ini menawarkan konsep *defensive Islamic pedagogy* untuk menjelaskan penggunaan pendidikan keagamaan sebagai strategi resistensi nonkonfrontatif dalam ruang publik yang dibatasi secara politik. Berbeda dari kajian yang melihat *Pandji Masjarakat* terutama sebagai media dakwah, oposisi politik, atau sarana penyebaran pendidikan Islam, penelitian ini menunjukkan bahwa Hamka membangun suatu arsitektur pertahanan kultural melalui lima mekanisme yang saling berkaitan: penguatan tauhid, pembentukan moral, rekonstruksi memori sejarah Islam, estetika teosentris, dan rekonsiliasi Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Strategi tersebut tidak bekerja melalui propaganda anti-komunis secara langsung, melainkan melalui pembentukan kerangka interpretatif yang memungkinkan pembaca mengenali, menilai, dan menolak pandangan dunia materialistik-ateistik. Dalam pengertian ini, pendidikan Islam berfungsi sekaligus sebagai pedagogi, produksi identitas, dan bentuk resistensi kultural.

Sering kali, respons tokoh Islam terhadap komunisme di era Demokrasi Terpimpin diidentikkan secara simplistik dengan gerakan konfrontasi politik

langsung atau polemik argumentatif di media massa. Faktanya, substansi edukasi yang digulirkan Hamka dalam *Pandji Masjarakat* didominasi oleh penguatan nilai tauhid, perbaikan moral (akhlak), serta restorasi kebudayaan Islam. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan mengisi celah akademis (*novelty*) tersebut dengan mengkaji bagaimana narasi pendidikan Islam dalam *Pandji Masjarakat* dijadikan sebuah sarana preventif guna membentengi identitas keislaman pembaca dari penetrasi wacana komunisme yang makin dominan, tanpa terjebak dalam bias normatif-ideologis yang tidak akademis.

Alih-alih menafsirkan *Pandji Masjarakat* semata-mata sebagai penerbitan Islam antikomunis, penelitian ini mengonseptualisasikan proyek editorial Hamka sebagai suatu bentuk pedagogi defensif yang dimediasi oleh media cetak (*print-mediated defensive pedagogy*), yang mengintegrasikan teologi, moralitas, ingatan historis, estetika keagamaan, dan keterlibatan dengan ilmu pengetahuan modern untuk membangun ketahanan kultural di tengah lingkungan politik Demokrasi Terpimpin yang semakin represif.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang meliputi pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi (analisis-sintesis), dan historiografi. Peneliti menggunakan pendekatan multidimensional seperti: (1) Pendekatan Politik Islam yang digunakan untuk melihat orientasi kelompok Islam modernis di masa Demokrasi Terpimpin. Peneliti menggunakan parameter amar makruf nahi mungkar dan kemaslahatan umat untuk membedah bagaimana motif keagamaan bertransformasi menjadi gerakan politik praktis melawan komunisme; (2) Pendekatan Sosiologi untuk membedah hubungan aktor (manusia) dengan kelompok sosial atau lembaganya. Pendekatan ini penting untuk memahami mengapa tokoh-tokoh seperti Hamka, Natsir, atau kalangan militer memiliki kedekatan emosional dan kesamaan sikap sosiologis-keagamaan pada masa itu; (3) Pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) dan Komunikasi Massa yang merupakan bagian paling krusial karena subjek penelitiannya adalah teks media (majalah).

Adapun penggunaan teori Norman Fairclough (analisis teks, proses produksi, dan sosiokultural) membantu peneliti membongkar ideologi tersembunyi, maksud politik, dan propaganda di balik sajak-sajak, tajuk rencana, maupun artikel keagamaan di dalam majalah. Teori komunikasi massa juga memperkuat

analisis mengenai bagaimana pesan tersebut digandakan dan menghasilkan efek tertentu bagi pembaca heterogen pada masanya. Analisis wacana kritis digunakan sebagai strategi analisis pelengkap, bukan sebagai pengganti kritik sumber dalam metode sejarah. Mengikuti perspektif multilevel Fairclough, analisis dilakukan pada tiga tingkat, yaitu teks, praktik diskursif, dan konteks sosiopolitik. Pada tingkat teks, penelitian mengkaji konsep-konsep yang muncul secara berulang serta kategori-kategori yang dipertentangkan, seperti tauhid/materialisme, agama/ateisme, dan kebudayaan yang berpusat pada Tuhan/kebudayaan sekuler. Pada tingkat praktik diskursif, analisis diarahkan pada pemilihan tulisan oleh redaksi, rubrik-rubrik yang terbit secara berulang, ragam tulisan, para kontributor, serta cara *Pandji Masjarakat* memosisikan dirinya di hadapan pembaca Muslim yang menjadi sasaran penerbitannya. Pada tingkat kontekstual, wacana-wacana tersebut ditafsirkan dalam kaitannya dengan situasi Demokrasi Terpimpin, politik Nasakom, menguatnya politik kebudayaan kelompok kiri, serta semakin ketatnya pembatasan terhadap media cetak yang bersikap kritis.

Dalam penelitian ini, sumber primer utama yang dieksplorasi secara kritis adalah bundel majalah *Pandji Masjarakat* dari edisi perdana tahun 1959 hingga masa pemberedelannya oleh rezim pada tahun 1960. Langkah interpretasi difokuskan pada analisis isi (*content analysis*) terhadap teks-teks rubrik keagamaan, sastra, dan sejarah guna membaca pesan implisit dan eksplisit terkait resistensi moral terhadap paham materialisme-komunis. Referensi sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah digunakan untuk merekonstruksi konteks sosiopolitik makro sengketa ideologi era Demokrasi Terpimpin.

Korpus primer penelitian ini terdiri atas edisi-edisi *Pandji Masjarakat* yang terbit antara Juni 1959 dan September 1960, mencakup periode sejak majalah tersebut didirikan hingga beberapa bulan menjelang pembredelannya. Alih-alih memperlakukan setiap artikel sebagai ekspresi pemikiran Hamka yang berdiri sendiri, penelitian ini mengkaji majalah tersebut sebagai suatu korpus diskursif yang saling terhubung. Perhatian khusus diberikan pada editorial, rubrik keagamaan, tulisan sejarah, karya sastra, pembahasan mengenai ilmu pengetahuan dan modernitas, serta artikel-artikel yang secara eksplisit maupun implisit membahas materialisme, ateisme, komunisme, dan sekularisme. Pembacaan berbasis korpus ini memungkinkan penelitian mengidentifikasi pola-pola pemikiran dan wacana yang berulang dalam berbagai jenis tulisan, sehingga analisis tidak hanya bertumpu pada sejumlah kecil kutipan yang bersifat ilustratif.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, seluruh teks yang relevan diklasifikasikan berdasarkan tema utama, yaitu tauhid dan pandangan hidup; moral dan pendidikan karakter; sejarah dan keteladanan; sastra dan estetika; sains dan modernitas; serta komunisme, ateisme, materialisme, dan sekularisme. Kedua, dilakukan pembacaan intratekstual untuk mengidentifikasi kosakata, oposisi konseptual, metafora, dan struktur argumentasi yang berulang. Ketiga, hasil pembacaan tersebut dikontekstualisasikan dengan konfigurasi politik Demokrasi Terpimpin dan perkembangan Nasakom untuk membedakan antara ajaran Islam yang bersifat umum dengan narasi yang memperoleh fungsi defensif dalam konteks politik 1959–1960.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selayang Pandang Majalah *Pandji Masjarakat*

Pandji Masjarakat didirikan pada tahun 1959 atas prakarsa K.H. Mohammad Fakih Usman sebagai pimpinan umum, dengan Hamka bersama Yusuf Abdullah Puar bertindak sebagai pemimpin redaksi. *Pandji Masjarakat* memposisikan diri sebagai majalah yang merdeka, independen, dan tidak mau sekadar menjadi pengikut penguasa (Pak Turut). Hal ini terbukti dari keberaniannya memuat kritik tajam dari tokoh bangsa. Di bawah asuhan Hamka, posisi majalah ini menjadi corong utama gerakan pembaruan Islam (modernisme) di Indonesia. Kantor redaksinya pun kemudian berpusat di pusat peradaban Islam modernis Jakarta, yaitu Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru.

Secara tegas, *Pandji Masjarakat* lahir sebagai media kaum modernis Islam membawa semangat reformasi yang dicetuskan oleh tokoh dunia seperti Sayid Jamaluddin al-Afghani dan Syekh Mohammad Abduh (*Pandji Masjarakat*, 1959). Tidak lepas dari pengaruh tokoh-tokoh gerakan pembaharu Islam baik di kawasan Timur Tengah (misalnya Muh. Iqbal, Muh. Rasjid Ridha) maupun tokoh gerakan pembaharu Islam di Indonesia sendiri (K.H. Ahmad Dahlan). Hal ini sebagaimana pernyataan yang dimuat di dalam *Pandji Masjarakat* (*Pandji Masjarakat*, No.1, 1959, hlm. 2) itu sendiri:

“...Tegasnja “*Pandji Masjarakat*” akan membawa suara reformasi dan modernisasi dalam Islam jang telah ditjetuskan oleh Saijid Djamaluddin el Afghani (1839-1897), sjech muhammad abduh (1849-1905) dan kawan-kawannja. “*Pandji Masjarakat*” akan meneliti kembali hasil2 perjuangangan reformasi dan modernisasi dalam Islam, terutama dari tokoh2 besar Islam mutachir jang diakui oleh seluruh dunia Islam, seperti Amir Sjakib Arselan, Muhammad

Iqbal, Muhammad Rasjid Ridha, Abul Kalam Azad, Kiaji H. Ahmad Dahlan, Ameer Ali dan sebagainya.”

Meskipun para pendirinya berorientasi pada paham Islam modernis “Muhammadiyah”, *Pandji Masjarakat* bersikap terbuka dan tidak menutup diri dari kelompok lain. Hamka melalui tulisan “Kita hanya satu” menegaskan bahwa umat Islam di Indonesia adalah satu wadah kaum Sunni (*Ahlus Sunnah wal Jamaah*). Dalam rubrik tanya jawabnya, Hamka secara sadar menghindari jawaban yang memicu polemik khilafiyah (perbedaan cabang hukum) demi menjaga persatuan umat. Bukti inklusivitas lainnya adalah pemuatan artikel karya pendiri NU, K.H. Hasyim Asy’ari.

Pada awal penerbitannya (No. 1-9), redaksi majalah menggunakan singkatan “Panmas” untuk merujuk pada majalah *Pandji Masjarakat*. Namun, menanggapi masukan pembaca dari berbagai wilayah seperti Sulawesi, Jawa, dan Sumatra, singkatan tersebut resmi diganti menjadi “Pandjimas” mulai nomor 10 dan seterusnya (*Pandji Masjarakat*, 1959, hlm. 2). Kendati demikian, dalam penelitian ini, penulis memilih untuk tetap menggunakan nama *Pandji Masjarakat* secara lengkap. Langkah ini diambil demi menjaga konsistensi, orisinalitas, dan kesesuaian dengan ejaan asli yang berlaku pada zaman tersebut (*Pandji Masjarakat*, bukan ejaan modern Panji Masyarakat).

Pada awal penerbitannya (1959), sambutan masyarakat sangat masif. Nomor 1 dan 2 dicetak sebanyak 10.000 eksemplar. Angka ini naik pada nomor 3 sampai 6 menjadi 15.000 eksemplar. Redaksi sempat merencanakan cetakan 20.000 eksemplar untuk nomor 7, namun gagal terealisasi bukan karena kekurangan pembaca, melainkan akibat kelangkaan dan sulitnya mendapatkan bahan baku kertas pada masa Demokrasi Terpimpin. Sirkulasi penyebaran majalah ini mencakup wilayah yang sangat luas, menyebar ke berbagai pulau besar di Indonesia meliputi Jawa, Madura, Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Majalah *Pandji Masjarakat* terbit dua kali sebulan yakni setiap tanggal 1 dan 15 dengan harga pada kisaran tahun 1959 sebesar Rp4,- untuk satu nomor atau jika berlangganan membayar Rp24,- untuk sekwartal (6 nomor). Terkadang pelanggan harus terpaksa dirugikan akibat hadirnya majalah dengan nomor rangkap disebabkan adanya alasan atau hambatan tertentu. Seperti misalnya yang terjadi pada No.32-33 edisi 15 Oktober 1960, majalah terbit dengan nomor rangkap karena sulitnya mendapatkan bantuan kertas dari pemerintah (*Pandji Masjarakat*, 1960, hlm. 2). Penerbitan majalah sebelumnya telah mengantongi izin dari pemerintah melalui Peperda Swatantra I Djakarta Raja No.SI/287/

PPDSIDR/K/1959 tanggal 8 Mei 1959. Majalah ini diterbitkan perdana oleh penerbit PT. Pustaka Antara yang saat itu beralamat di Jalan Madjapahit 28/3 Jakarta.

Pembaca setianya merupakan masyarakat Muslim, kaum terpelajar, simpatisan pemikiran modernisme Islam, serta simpatisan dan mantan anggota Partai Masyumi (mengingat kedekatan emosional tokoh-tokoh Masyumi seperti M. Natsir, Moh. Roem, dan Sjafruddin Prawiranegara yang tulisannya kerap dimuat di dalam majalah). Di tengah era Demokrasi Terpimpin dan Nasakom yang bagi sebagian kalangan kala itu dianggap otoriter (1959-1960), *Pandji Masjarakat* menjadi ruang bagi para cendekiawan independen (seperti Mohammad Hatta, Moh. Roem, Prof. Bahder Djohan) untuk tetap menyuarakan pikiran kritis mereka terhadap pemerintahan Soekarno, salah satunya pemuatan tulisan kritis Hatta berjudul “Demokrasi Kita”.

Wacana pendidikan Islam yang diangkat oleh *Pandji Masjarakat* (1959-1960) memuat beberapa fokus penting, di antaranya:

1. Revitalisasi Institusi dan Kurikulum. Terdapat dorongan kuat untuk menggiatkan kembali pendidikan Madrasah (oleh K.H. Asnawi Hadisiswaja) serta urgensi “peremajaan buku-buku pelajaran di sekolah-sekolah Islam” (oleh SSB. Nan Sati yang kemudian disambut baik oleh PP Muhammadiyah Majelis Pengajaran) agar tidak tertinggal oleh zaman.
2. Pendidikan Karakter, Kedewasaan, dan Demokrasi. Melalui tulisan Kasim Mansur, pendidikan Islam disoroti hubungannya dengan pembentukan keluhuran budi masyarakat, pemikiran demokrasi di Indonesia merdeka, hingga pencapaian kedewasaan.
3. Pendidikan Anak Usia Dini. Ahmad Raharjo menekankan pentingnya taman kanak-kanak sebagai fase murni jiwa anak yang harus dijauhkan dari tipu daya dan didekatkan pada nilai-nilai keagamaan sejak dini.
4. Integrasi Sains dan Agama. Pendidikan Islam dalam *Pandji Masjarakat* tidak anti-sains. Hal ini dibuktikan dengan pembahasan mengenai teori Darwinisme oleh Prof. Bahder Djohan serta ulasan berseri mengenai kontribusi emas kebudayaan Islam terhadap Ilmu Pengetahuan Alam (kimia, fisika, perbintangan) 1000 tahun yang lalu. Ada juga kritik terhadap kepincangan pengajaran “Islamologi” di perguruan tinggi.
5. Tantangan Modernitas terhadap Tauhid: Dalam rubrik “Pandangan Hidup Muslim”, Hamka menulis artikel berjudul “Lunik III Mentjapai Bulan”. Tulisan ini menyoroti bagaimana pencapaian teknologi antariksa modern (Uni Soviet saat itu) berpotensi

mengguncang sendi tauhid umat manusia jika tidak disikapi dengan keimanan yang kokoh.

6. Tauhid sebagai Pakaian Hidup. Hamka juga menguraikan bagaimana manifestasi iman dan tauhid yang telah menyatu sebagai “pakaian hidup” seorang muslim akan menjadi perisai utama dalam membentengi diri dari arus materialisme duniawi.
7. Kajian Aliran Tauhid. Artikel oleh H. Aboebakar Atjeh yang berjudul “Wahhabi dan tauhid” memberikan analisis komprehensif mengenai tingkatan tauhid, kedudukan tarekat, serta persoalan tawassul (perantara ibadah) yang disandarkan langsung pada sumber Al-Qur’an.

Temuan ini juga memperlihatkan paradoks produktif dalam strategi Hamka. Pertahanan terhadap materialisme tidak dilakukan dengan menolak modernitas. Sebaliknya, *Pandji Masjarakat* berupaya memisahkan *modern science from materialist epistemology*. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan rasionalitas dapat diterima sepanjang ditempatkan dalam horizon ketuhanan. Pola ini mencerminkan karakter modernisme Islam yang menggabungkan reformasi keagamaan dengan keterbukaan terhadap pengetahuan modern. Karena itu, pertahanan ideologis yang dibangun Hamka lebih tepat dipahami sebagai proses *selective appropriation of modernity* daripada penolakan terhadap dunia modern.

Di sisi lain, sikap anti-komunis dan anti-atheisme merupakan garis perjuangan ideologis yang sangat tegas dari *Pandji Masjarakat* (1959-1960), mengingat majalah ini terbit di tengah meningkatnya kekuatan PKI dan pengaruh Nasakom. Hal ini tersirat di antaranya:

1. Misi Utama Media. Sejak awal berdiri, misi reformasi *Pandji Masjarakat* secara eksplisit menitikberatkan pada upaya “Memperjuangkan Islam secara modern terhadap serangan bahaya materialisme dan atheisme”.
2. Kritik terhadap Rezim Komunis Dunia. Pada bidang politik internasional, editorial *Pandji Masjarakat* (No. 10) secara tajam menyindir kegagalan rezim komunis totalitarian Soviet lewat tulisan “Agama telah menertawakan Stalin?”. Artikel tersebut menganalisis mengapa agama Islam dan Kristen tidak dapat dibasmi oleh pemerintahan diktator atheis, dan justru menunjukkan tren di mana masyarakat di era Khrushchev semakin tertarik kembali pada agama.
3. Kewaspadaan Bahaya Komunisme di Asia Tenggara. Melalui artikel Arif Effendi yang berjudul “Ko-eksistensi dan Ekspansi RRT”, *Pandji Masjarakat* memberikan analisis ilmiah mengenai besarnya ancaman bahaya perluasan pengaruh komunisme

(disebut juga sebagai bahaya kuning) yang sedang mengintai wilayah Asia Tenggara.

4. Analisis Pemimpin Islam. *Pandji Masjarakat* juga memuat analisis Yusuf Abdullah Puar mengenai pandangan Bung Hatta yang dengan tegas menyatakan bahwa orang Islam yang mengaku dirinya Marxis adalah orang yang “tidak beres” secara ideologis.

Keragaman rubrik tersebut menunjukkan bahwa strategi pendidikan *Pandji Masjarakat* tidak dapat direduksi menjadi indoktrinasi anti-komunis. Justru kekuatan strateginya terletak pada pembentukan suatu Islamic worldview yang mencakup agama, sejarah, seni, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Dalam pola ini, pembaca tidak terus-menerus diperintahkan untuk menolak komunisme; mereka terlebih dahulu dibentuk untuk melihat realitas melalui kerangka epistemik yang menempatkan tauhid sebagai pusat pengetahuan dan tindakan moral. Mekanisme ini menjelaskan mengapa artikel mengenai sains, pendidikan anak, sejarah tokoh Muslim, dan sastra memiliki fungsi ideologis meskipun tidak selalu menyebut komunisme secara eksplisit.

Secara garis besar, orientasi ideologis *Pandji Masjarakat* dapat dibagi ke dalam tiga poros utama: (1) Reformasi dan Modernisme Islam dengan membawa visi sebagai majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam yang selaras dengan semangat pembaruan Islam. Sudut pandang yang digunakan selalu bersumber pada nilai-nilai ketauhidan yang progresif guna menjawab tantangan zaman; (2) Anti-Komunisme dan Anti-Ateisme yang secara tegas menentang paham materialisme, ateisme, dan komunisme. Majalah ini aktif membangun stereotip negatif terhadap komunisme (misalnya melalui liputan pembasmian agama di RRT) dan mendukung pelarangan paham Marxisme-Komunisme di Indonesia; (3) Anti-Sekularisme namun Pro-Demokrasi, yaitu menolak sekularisme Barat yang menjauhkan agama dari negara, tetapi di sisi lain sangat menjunjung tinggi kebebasan berpikir, kemerdekaan menyatakan pikiran, serta hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan dinamika perjalanan Majalah *Pandji Masjarakat* dari tahun 1959 sampai 1960, dapat ditarik beberapa kesimpulan historis yang krusial, di antaranya yaitu:

1. Pers sebagai Arena Pertarungan Ideologi (Antitesis Komunisme) pada periode pertama (1959-1960), ketika iklim politik Demokrasi Terpimpin mulai condong ke kiri dan pengaruh PKI menguat, *Pandji Masjarakat* hadir sebagai antitesis ideologis. Strategi redaksi yang memasukkan nilai-nilai “ketauhidan” secara masif dalam artikel keagamaan, cerpen, hingga sajak, sejatinya merupakan gerakan kontra-

propaganda (bendungan budaya) agar umat Islam tidak terpengaruh oleh paham ateisme.

2. Tulisan “Demokrasi Kita” Hatta sebagai katalisator historis keputusan Hamka untuk tetap menerbitkan tulisan Moh. Hatta tersebut pada edisi 1 Mei 1960 bukan sekadar urusan jurnalisme, melainkan sebuah tindakan politik yang heroik. Hamka sadar akan risiko pembungkaman oleh rezim Soekarno, namun ia memilih menjadikan majalahnya sebagai wadah penyelamat suara demokrasi di kala para pemimpin lain dicekam ketakutan. Pemberedelan majalah ini pada Oktober 1960 menjadi bukti empiris dari represifnya pemerintahan Orde Lama terhadap pers yang kritis.

Pada paruh akhir tahun 1950-an, masyarakat muslim Indonesia dihadapkan pada penetrasi ideologi sekulerisme, materialisme, dan komunisme yang kian dinamis. Kondisi tersebut mendorong para intelektual muslim untuk memaksimalkan dakwah berbasis tulisan. Salah satu aktor utamanya adalah Hamka, yang telah menggeluti dunia jurnalistik sejak tahun 1925 melalui Tabligh Muhammadiyah dan Pedoman Masjarakat (Junaedhie, 1994; A. Teeuw, 1980). Pada 15 Juni 1959, Hamka bersama Moh. Faqih Usman mendirikan majalah *Pandji Masjarakat* di Jakarta sebagai media kebudayaan bernapas pembaruan Islam. Walaupun majalah ini tidak terafiliasi dengan organisasi politik maupun ormas tertentu secara resmi, ia membawa visi besar untuk melakukan purifikasi pemikiran sekaligus membentengi umat dari tarikan ideologi luar (*Pandji Masjarakat*, 1959, hlm.1).

Jajaran redaksi menggariskan empat orientasi utama *Pandji Masjarakat*: (1) Menghimpun potensi sastrawan dan penulis muslim untuk memperkokoh jurnalistik Islam sebagai instrumen perjuangan kultural; (2) Meramaikan kembali jagat literasi yang saat itu dinilai mulai terpengaruh oleh cara pandang materialistik; (3) Menyediakan materi diskusi bermutu bagi masyarakat guna mempertebal daya tahan spiritual; dan (4) Menjadi media pembaruan (reformasi) Islam (*Pandji Masjarakat*, 1959, hlm. 2). Terbit dua kali sebulan, majalah ini memuat konten yang variatif lewat rubrikasi tetap seperti Pandangan Hidup Muslim, Dari Hati ke Hati, Masyarakat Kita, dan Tinjauan Luar Negeri. Fleksibilitas wacana di dalamnya berhasil menarik kontribusi tulisan dari tokoh-tokoh penting seperti Mohammad Hatta, Mohammad Roem, hingga Sidi Gazalba (Hamka & Rafiq, 1989, hlm. 236). Dinamika politik yang memanas akhirnya membuat majalah ini diberedel oleh pemerintah pada tahun 1960, sebelum akhirnya diizinkan terbit kembali pasca-kejatuhan rezim Demokrasi Terpimpin pada tahun 1966.

Narasi Pendidikan Islam sebagai Strategi Defensif Terhadap Ideologi Kiri

Eskalasi pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) pasca-Pemilu 1955 menjalar kuat ke ranah kebudayaan melalui Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) serta media pers afliasinya seperti *Harian Rakjat* dan *Warta Bhakti* (Susanto, 2015, hlm. 462-463; Rhoma & Muhidin, 2008, hlm. 77). Dominasi wacana realisme-sosialis yang diusung kelompok kiri di ruang publik direspons oleh kelompok Islam melalui institusi seni seperti Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI) serta optimalisasi publikasi cetak seperti *Pandji Masjarakat*. Di bawah kungkungan doktrin Nasakom yang melarang kritik terbuka antarpilar politik haluan negara, Hamka memilih jalur diplomasi edukatif-spiritual. Alih-alih melakukan konfrontasi politik praktis yang rentan represi, Hamka menjadikan *Pandji Masjarakat* sebagai ruang internalisasi nilai keagamaan yang berfungsi sebagai spiritual defense (pertahanan spiritual).

Strategi defensif ini diwujudkan melalui pengarusutamaan konsep ketauhidan di dalam konten majalah secara masif untuk meng-counter pandangan hidup materialistis-ateis. Melalui rubrik tetap “Pandangan Hidup Muslim”, Hamka secara kontinu menyuntikkan konsep kesadaran bertuhan. Sebagai contoh, dalam artikelnya yang bertajuk “Istiqomah” di edisi No. 1, 15 Juni 1959 (*Pandji Masjarakat*, 1959, hlm. 5), Hamka menegaskan:

“Dengan itulah kita hadapi segala persoalan didalam hidup ini. Dengan itu kita kibarkan PANDJI kita!... Dan dengan pendirian itu kita hidup di-tengah2 MASJARAKAT! Dengan itu kita dijiwai seluruh KEBUDAJAAN dalam segala matjam seginja, dan dengan itu pula kita mentjari pengetahuan dalam segala matjam tjabangnja!”

Secara implisit, narasi “Istiqomah” dalam bertauhid ini diproyeksikan sebagai antitesis terhadap doktrin komunisme yang menafikan eksistensi Tuhan. Hamka membangun struktur kesadaran pembaca bahwa kebudayaan dan ilmu pengetahuan harus bermuara pada nilai ketuhanan (*Al-Haqq*). Pembendungan pengaruh kiri juga dilakukan lewat penyajian naskah klasik sufistik, seperti tulisan tentang “Tjinta akan Tuhan” karya Imam Al-Ghazali yang dimuat secara berseri di *Pandji Masjarakat*, No. 2, 1 Juli 1959 (*Pandji Masjarakat*, 1959, hlm. 13-15). Melalui doktrin cinta Ilahi ini, *Pandji Masjarakat* menawarkan kepuasan spiritual keagamaan demi meredam pesona doktrin dialektika materialisme yang ditawarkan kelompok kiri bagi masyarakat bawah.

Dalam perspektif ini, tauhid bekerja bukan hanya sebagai doktrin teologis tetapi sebagai *interpretive frame*. Ia menyediakan seperangkat kategori yang digunakan

pembaca untuk menilai modernitas, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ideologi politik. Karena itu, oposisi utama yang dibangun *Pandji Masjarakat* bukan semata Islam versus PKI sebagai organisasi politik, melainkan pandangan dunia teosentris versus materialisme sebagai cara memahami manusia dan masyarakat. Perbedaan ini penting karena menjelaskan mengapa strategi Hamka dapat tetap bekerja bahkan ketika majalah tidak secara eksplisit menyerang PKI.

Di samping penguatan tauhid, strategi preventif dunia pers Islam ini menysar ranah pendidikan karakter dan moral melalui rekonstruksi sejarah lokal. Melalui rubrik “Lembaran Sejarah”, *Pandji Masjarakat* menampilkan heroisme tokoh-tokoh Muslim seperti Tuanku Imam Bonjol, Teuku Cik Di Tiro, dan Sultan Hasanuddin. Penulisan biografi pahlawan muslim ini mengintegrasikan nilai religiusitas dengan semangat patriotisme. Hal ini dilakukan demi mengimbangi narasi perjuangan kelas (*class struggle*) yang marak dipropagandakan oleh pers kiri, dan menggantinya dengan narasi perjuangan moral-spiritual berbasis pembelaan tanah air demi rida Allah.

Penggunaan sejarah dalam *Pandji Masjarakat* memperlihatkan bahwa pertahanan ideologis juga bekerja melalui pedagogi memori. Figur Imam Bonjol, Teuku Cik Di Tiro, dan Sultan Hasanuddin tidak hanya diperkenalkan sebagai tokoh masa lalu, tetapi ditempatkan sebagai sumber keteladanan moral yang menghubungkan Islam dengan patriotisme. Dengan demikian, majalah menawarkan struktur ingatan alternatif terhadap interpretasi sejarah berbasis konflik kelas. Sejarah berfungsi sebagai sumber identifikasi: pembaca diajak membayangkan dirinya sebagai bagian dari komunitas moral-historis yang kontinuitasnya melampaui konflik politik kontemporer.

Kontestasi wacana juga merambah pada sub-rubrik “Masyarakat Kita” dan sastra. Menyadari taktik Lekra yang menggunakan seni sebagai alat politik kelompok, *Pandji Masjarakat* menawarkan gagasan tandingan berupa estetika teosentris. Dalam artikel di edisi No. 14, 1 Januari 1960 “Hakekat Hidup Melalui Jendela Seni” (*Pandji Masjarakat*, 1960, hlm. 4), Hamka mengemukakan:

“Seni jang sampai kepada puntjaknja ialah gabungan diantara rasa keindahan (Djamal), dan rasa kesempurnaan (Kamal) dan rasa kemuliaan (Djalal)... membawa siseniman FANA, hilang kedalam jang BAQA!”

Fungsi serupa terlihat pada sastra dan seni. Ketika Hamka menghubungkan estetika dengan Djamal, Kamal, dan Djalal, seni ditempatkan dalam horizon transendental. Perdebatan dengan realisme sosialis

dengan demikian tidak hanya menyangkut selera artistik, tetapi menyangkut pertanyaan yang lebih mendasar mengenai untuk apa kebudayaan diproduksi dan manusia macam apa yang hendak dibentuk olehnya. Di sinilah sastra memperoleh fungsi pedagogis: ia menjadi sarana pembentukan sensibilitas moral yang berbeda dari estetika politik berbasis perjuangan kelas.

Konsep seni religius ini diperkuat oleh Jusuf Abdullah Puar dalam tulisan “Menguraikan Posisi Sastra nan Bernafaskan Ketuhanan, Persajakan Islam dalam Menghadapi Individualisme, Naturalisme, dan Realisme” (*Pandji Masjarakat*, 15 Januari 1960, hlm. 12). Artikel tersebut menekankan bahwa sastra Islam wajib berlandaskan tauhid guna mereduksi imbas negatif dari paham realisme-sosialis radikal. Selain komunisme, majalah ini juga mengantisipasi perluasan paham sekularisme barat melalui artikel terjemahan seperti “Islam Membandingi Sekularisme Barat” oleh Mohammad Hassan El-Zayyat guna membuktikan keselarasan agama dan modernitas (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2017, hlm. 1015).

Secara metodologis, sulit menyajikan bukti empiris berupa statistik penurunan jumlah simpatisan PKI atau perubahan perilaku pembaca secara langsung akibat sirkulasi majalah ini. Namun, secara historis, masifnya penetrasi narasi tauhid, moralitas keagamaan, dan estetika Islam dalam *Pandji Masjarakat* membuktikan adanya sebuah pola resistensi budaya dan pertahanan ideologis. Pendidikan Islam tidak digerakkan sebagai instrumen ofensif untuk menghancurkan kekuatan komunis secara fisik, melainkan sebagai sebuah sarana filterisasi nilai agar basis massa umat Islam memiliki ketahanan internal (*self-reliance*) dalam menyaring dogma ateisme radikal yang difasilitasi politik makro era Demokrasi Terpimpin.

Pilihan Hamka untuk menggunakan strategi defensif alih-alih konfrontasi fisik atau politik praktis yang agresif merupakan sebuah kalkulasi strategis yang sangat rasional, bukan sekadar sikap pasrah. Di bawah bayang-bayang rezim Demokrasi Terpimpin dan doktrin Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme), konstelasi politik Indonesia kala itu sangat tidak berpihak pada kelompok Islam kritis. Pada akhir 1950-an, PKI mengalami eskalasi pengaruh yang luar biasa besar pasca-Pemilu 1955. Mereka berhasil masuk ke dalam lingkaran utama kekuasaan Sukarno melalui poros Nasakom. Di bawah sistem Demokrasi Terpimpin, kritik terbuka terhadap salah satu pilar Nasakom (termasuk Komunisme) akan langsung dicap oleh negara sebagai tindakan kontra-revolusioner, anti-Pancasila, atau subversif. Aparat keamanan dan hukum dikondisikan untuk menjaga stabilitas poros ini. Jika

Hamka memilih jalur konfrontasi politik praktis yang frontal, risikonya bukan lagi sekadar kalah debat wacana, melainkan penangkapan, pelarangan total organisasi, hingga pembungkaman fisik oleh otoritas negara. Oleh karena itu, Hamka sadar bahwa benturan langsung di ranah politik formal adalah bentuk “bunuh diri politik” (*political suicide*) bagi umat Islam saat itu.

Kekhawatiran Hamka akan represi negara terbukti sepenuhnya benar pada tahun 1960. Ketika *Pandji Masjarakat* (No. 22, Mei 1960) memutuskan untuk memuat artikel Mohammad Hatta yang berjudul “Demokrasi Kita” sebuah kritik politik yang sangat tajam, langsung, dan lugas terhadap kepemimpinan Soekarno yang dianggap otoriter. Artikel Hatta tersebut menjadi pemantik utama bagi pemerintah untuk memberedat *Pandji Masjarakat* secara total pada tahun 1960. Tidak berhenti di sana, beberapa tahun kemudian (1964), Hamka sendiri akhirnya ditangkap dan dipenjarakan tanpa proses peradilan yang adil atas tuduhan melanggar uu anti-subversif. peristiwa pembredelan tahun 1960 ini menjadi bukti empiris-historis bahwa setiap bentuk kritik langsung atau konfrontasi terbuka di era tersebut akan langsung berujung pada represi ekstrem. Pilihan Hamka untuk menerapkan strategi defensif pemikiran pendidikan Islam terutama terhadap ekspansi ideologi kiri pada edisi awal (1959) adalah upaya sadar untuk memperpanjang napas perjuangan literasi Islam agar tidak dibungkam terlalu dini.

Bukti-bukti tersebut menunjukkan adanya suatu bentuk pedagogi defensif yang dimediasi oleh media cetak (*print-mediated defensive pedagogy*). Karakter defensifnya tidak terutama diwujudkan melalui serangan politik secara terbuka, melainkan melalui konstruksi sistematis atas sumber daya moral, historis, estetis, dan epistemik alternatif. Melalui paparan yang berulang terhadap berbagai sumber daya tersebut, pembaca diarahkan untuk membangun kerangka internal yang dapat digunakan dalam menyaring berbagai klaim ideologis yang saling bersaing. Dengan demikian, *Pandji Masjarakat* berfungsi secara simultan sebagai majalah, institusi pendidikan informal, dan ruang resistensi kultural.

KESIMPULAN

Pandji Masjarakat di bawah komando Hamka dan tokoh modernis lainnya bukan sekadar majalah keagamaan biasa. Majalah ini berfungsi sebagai benteng ideologis Islam yang progresif; media yang mengupayakan modernisasi pendidikan Islam dan penguatan tauhid umat, sekaligus menjadi instrumen kritis yang gigih melawan penetrasi paham atheisme,

materialisme, dan komunisme di Indonesia pada akhir tahun 1950-an hingga 1960-an.

Berdasarkan analisis terhadap konten dan dinamika rubrikasi majalah *Pandji Masjarakat* pada periode 1959-1960, dapat disimpulkan bahwa narasi pendidikan Islam yang diusung oleh Hamka merupakan bentuk strategi defensif spiritual dan kultural yang sistematis dalam merespons ekspansi ideologi kiri. Di tengah hegemoni politik Demokrasi Terpimpin yang akomodatif terhadap komunisme, Hamka tidak memilih jalur konfrontasi politik terbuka yang destruktif, melainkan mengoptimalkan media cetak sebagai benteng preventif. Melalui internalisasi nilai ketauhidan, penyebaran kisah keteladanan sejarah, dan konseptualisasi seni yang berorientasi ketuhanan, Hamka berhasil merawat identitas keagamaan serta memelihara batas imajiner umat agar tidak terpengaruh oleh cara pandang materialisme-ateis.

Secara teoretis, artikel ini menunjukkan bahwa pers Islam pada awal dekade 1960-an memainkan fungsi krusial sebagai agen pendidikan karakter berbasis religiusitas. Relevansi historis dari penelitian ini mengisyaratkan bahwa media massa bermutu tinggi dapat dijadikan sumber belajar alternatif yang efektif untuk mentransfer nilai-nilai moralitas. Ketokohan intelektual seperti Hamka membuktikan bahwa perjuangan ideologis di ruang publik tidak selamanya harus bermanifestasi dalam gerakan fisik-praktis, melainkan dapat diwujudkan secara kokoh lewat keandalan pena dan kedalaman narasi edukasi keagamaan.

Berdasarkan temuan penelitian, *defensive Islamic pedagogy* Hamka bekerja melalui lima lapisan yang saling memperkuat. Pertama, *epistemic defence*, melalui tauhid sebagai kerangka memahami realitas. Kedua, *moral defence*, melalui pendidikan akhlak dan pembentukan karakter. Ketiga, *mnemonic defence*, melalui rekonstruksi sejarah dan keteladanan tokoh Muslim. Keempat, *aesthetic defence*, melalui sastra dan seni bernapaskan ketuhanan. Kelima, *intellectual defence*, melalui penerimaan kritis terhadap sains dan modernitas tanpa menerima materialisme sebagai dasar epistemologisnya. Kelima mekanisme tersebut membentuk apa yang dalam artikel ini disebut *print-mediated defensive pedagogy*: penggunaan media cetak untuk membangun kapasitas internal komunitas dalam menyaring ideologi yang dipersepsikan mengancam identitas religiusnya.

REFERENSI

- Abdullah, T., & Lopian, A. B. (Eds.). (2012). *Pascarevolusi: Indonesia dalam arus sejarah* (Vol. 7). Ichtiar Baru van Hoeve & Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Akmal. (2021). State repression towards the press in the Guided Democracy era: The case of *Pandji Masjarakat* and Gema Islam (1959–1966). In *Proceedings of the International University Symposium on Humanities and Arts 2020 (INUSHARTS 2020)*. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211110.001>
- Alfian. (1989). *Muhammadiyah: The political behavior of a Muslim modernist organization under the Dutch colonial rule*. Gadjah Mada University Press.
- Al-Ghazali, I. A. H. M. (1959, July 1). Tjinta akan Tuhan. *Pandji Masjarakat*, (2).
- Al-Hamdi, R. (2013). *Teori dan praktik politik di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Aliah, Y. (2014). *Analisis wacana kritis dalam multiperspektif*. Refika Aditama.
- Azra, A. (2002). *Islam Nusantara: Jaringan global dan lokal*. Mizan.
- Chisaan, C. (2008). *Lesbumi: Strategi politik kebudayaan*. LKiS.
- Chisaan, C. (2011). Pencarian identitas kebudayaan Islam Indonesia 1956–1965. In J. Lindsay & M. H. T. Liem (Eds.), *Ahli waris budaya dunia: Menjadi Indonesia 1950–1965*. Pustaka Larasan.
- Fairclough, N. (2012). Critical discourse analysis: The critical study of language. In A. Badara (Ed.), *Analisis wacana: Teori, metode, dan penerapannya pada wacana media*. Kencana.
- Federspiel, H. M. (2006). *Islam and ideology in the emerging Indonesian state: The Persatuan Islam (PERSIS), 1923–1957*. Brill.
- Hamka. (1959, June 15). Istiqomah. *Pandji Masjarakat*, (1).
- Hamka. (1960, January 1). Hakekat hidup melalui jendela seni. *Pandji Masjarakat*, (14).
- Hamka. (1962, January 15). *Kebudajaan Islam adalah mazhar dari tauhid dan taqwa*
- Hamka, R., & Rafiq. (Eds.). (1989). *Islam dan era informasi*. Pustaka Panjimas.
- Hamka, R. (1989). *Islam dan era informasi: Buku peringatan 30 tahun Majalah Panji Masyarakat 1959–1989*. Pustaka Panjimas.

- Hidayat, R., & Siregar, M. (2021). Konstruksi pendidikan Islam dalam pemikiran Buya Hamka: Integrasi akal dan wahyu di era modern. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ittihad*, 5(2), 112–125.
- Junaedhie, K. (1994). *Ensiklopedi pers Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana.
- Liliweri, A. (1991). *Memahami peran komunikasi massa dalam masyarakat*. Citra Aditya Bakti.
- Marbun, B. N. (1996). *Kamus politik*. Pustaka Sinar Harapan.
- Mulyani, S., & Rosyadi, K. (2023). Internalisasi nilai-nilai ketauhidan dalam pendidikan akhlak perspektif Hamka: Solusi menghadapi krisis moral kontemporer. *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 11(1), 45–58.
- Mustapa, H., & Hamid, I. (2024). Nasakom dilemma and the politics of Islamic organizations: NU and Muhammadiyah organizational politics during the Guided Democracy period (1959–1966). *Politea: Jurnal Politik Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.20414/politea.v7i1.9780>
- Musyafa, H. (2016). *Hamka: Sebuah novel biografi*. Imania.
- Musyafa, H. (2018). *Buya Hamka: Kisah hidup sang ulama karismatik dan pujangga legendaris*. Falcon Publishing.
- Muzakki, A. (2007). Cultivating Islamic ideology: Print Islam in post-independence Indonesia (A preliminary study). *Studia Islamika*, 14(3). <https://doi.org/10.15408/sdi.v14i3.543>
- Muzakki, A. (2011). Advancing larger democracy in Indonesia through Islamic print media. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 49(2), 231–252. <https://doi.org/10.14421/ajis.2011.492.231-252>
- Noer, D. (1988). Islam dan politik: Mayoritas atau minoritas? *Prisma*, 17(5).
- Muhyidin, R. A. A., & Adam, Y. F. (2023). Two imaginations of Indonesia: A study on the Islamic and nationalism ideologies in Pandji Islam magazine, 1940. *Insaniyat: Journal of Islam and Humanities*, 8(1), 61–77. <https://doi.org/10.15408/insaniyat.v8i1.33856>
- Nurdin, A. (2022). Peran media pers Islam sebagai lembaga pendidikan non-formal: Refleksi pemikiran Hamka dalam Majalah Pandji Masjarakat. *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 9(3), 201–215.
- Pandji Masjarakat* (No. 1). (1959, June 15).
- Pandji Masjarakat* (No. 2). (1959, July 1).
- Pandji Masjarakat* (No. 3). (1959, July 15).
- Pandji Masjarakat* (No. 4). (1959, August 1).
- Pandji Masjarakat* (No. 5). (1959, August 15).
- Pandji Masjarakat* (No. 6). (1959, September 1).
- Pandji Masjarakat* (No. 7). (1959, September 15).
- Pandji Masjarakat* (No. 8). (1959, October 1).
- Pandji Masjarakat* (No. 9). (1959, October 15).
- Pandji Masjarakat* (No. 10). (1959, November 1).
- Pandji Masjarakat* (No. 11). (1959, November 15).
- Pandji Masjarakat* (No. 12). (1959, December 1).
- Pandji Masjarakat* (No. 13). (1959, December 15).
- Pandji Masjarakat* (No. 14). (1960, January 1).
- Pandji Masjarakat* (No. 15). (1960, January 15).
- Pandji Masjarakat* (No. 16). (1960, February 1).
- Pandji Masjarakat* (No. 17). (1960, February 15).
- Pandji Masjarakat* (No. 18). (1960, March 1).
- Pandji Masjarakat* (No. 19). (1960, March 15).
- Pandji Masjarakat* (No. 20). (1960, April 1).
- Pandji Masjarakat* (No. 21). (1960, April 15).
- Pandji Masjarakat* (No. 22). (1960, May 1).
- Pandji Masjarakat* (No. 23). (1960, May 15).
- Pandji Masjarakat* (No. 25). (1960, June 15).
- Pandji Masjarakat* (No. 26). (1960, July 1).
- Pandji Masjarakat* (No. 27). (1960, July 15).
- Pandji Masjarakat* (No. 28). (1960, August 1).
- Pandji Masjarakat* (No. 29). (1960, August 15).
- Pandji Masjarakat* (No. 30). (1960, September 1).
- Pandji Masjarakat* (No. 31). (1960, September 15).
- Pandji Masjarakat* (Nos. 32–33). (1960, October 1–15).
- Prasetyo, A., & Wahyuni, T. (2020). Relevansi konsep tri pusat pendidikan Buya Hamka terhadap tantangan pendidikan karakter di era digital. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 7(2), 89–101.
- Puar, J. A. (1960, January 15). Menguraikan posisi sastra nan bernafaskan ketuhanan, persajakan Islam dalam menghadapi individualisme, naturalisme, dan realisme. *Pandji Masjarakat*, (15).
- Redaktur Pandji Masjarakat. (1959, June 15). Sebab Pandji Masjarakat diterbitkan. *Pandji Masjarakat*, (1).
- Redaktur Pandji Masjarakat. (1959, October 15). Kandungan intisari. *Pandji Masjarakat*, (9).
- Rush, J. R. (2016). *Hamka's great story: A master writer's vision of Islam for modern Indonesia*. University of Wisconsin Press.
- Said, T. (1988). *Sejarah pers nasional dan pembangunan pers Pancasila*. Haji Masagung.
- Sambutan Ketua MASBI Dr. Hamka pada malam penutupan Musyawarah HSBI tgl. 15–17 Desember 1961 di Jakarta. *Gema Islam*, (1).
- Shadiy, H. (1984). *Sosiologi untuk masyarakat Indonesia*. Bima Aksara.

- Solihin. (2007). *Pandangan M. Amien Rais tentang politik Islam Indonesia: Telaah atas hubungan Islam dan negara periode 1985–2000* [Publikasi ilmiah]. Lembaga Penelitian UIN Sunan Gunung Djati.
- Susanto, D. (2015). *Kamus istilah sastra*. Pustaka Pelajar.
- Teeuw, A. (1980). *Sastra baru Indonesia (Jilid 1)*. Nusa Indah.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2017). *Kamus besar bahasa Indonesia (3rd ed.)*. Balai Pustaka.
- Tim Redaksi. (1959, July 15). *Pandji Masjarakat*, (3).
- Tim Redaksi. (1960, May 1). *Pandji Masjarakat*, (22).
- Tim Yayasan Nurul Islam. (1978). *Kenang-kenangan 70 tahun Buya Hamka*. Yayasan Nurul Islam.
- Wiryanto. (2000). *Teori komunikasi massa*. Grasindo.
- Yuliantri, R. D. A., & Dahlan, M. (2008). *Lekra tak membakar buku: Suara senyap lembar kebudayaan Harian Rakjat 1950–1965*. Merakesumba.
- Zara, M. Y. (2026). Print, piety, and patriotism: Taman Poestaka Moehammadijah and the creation of enlightened native Muslims in colonial Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 64(1), 89–119. <https://doi.org/10.14421/ajis.2026.641.89-119>.